

# EVALUASI KINERJA PEMERINTAHAN KAMPUNG OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK

Surya Dailiati<sup>1</sup>; Hernimawati<sup>2</sup>; Sudaryanto<sup>3</sup>; Zefron<sup>4</sup>

Prodi Administrasi Publik, FIA Universitas Lancang Kuning, Riau  
Jln. Yos Sudarso Km 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 Fax. (0761) 52581  
E-mail : [sudaryantofia@unilak.ac.id](mailto:sudaryantofia@unilak.ac.id) (Korespondensi)

Submit : 10/10/2023

Review : 10/10/2023

Publish : 26/10/2023

**Abstract:** The purpose of this study was to describe and analyze the implementation of the role of the Siak District Inspectorate in evaluating village/village government performance and its obstacles. The research was conducted at the Siak District Inspectorate Office. The informants in this study were the State Civil Apparatuses of the Siak Regency Inspectorate Office. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. The data that has been collected is then analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the evaluation of the performance of the village/village administration in Siak Regency had gone well as planned by the Siak District Inspectorate. Obstacles in evaluating the performance of village/village government in Siak Regency are: the use of performance applications that have not been carried out independently by the village/village government and the leveling of development has not been in all villages/villages in terms of village facilities and infrastructure.

**Keywords:** *Evaluation, Performance, Governance, Village, Siak*

Inspektorat Daerah Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999. Berdasarkan undang-undang tersebut dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah dan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2005. Mulai tahun 2008 sesuai Perda Nomor 38 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak, dan melalui perubahan kedua dengan Perda Nomor 5 tahun 2011, terakhir melalui Perda Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Siak. Badan Pengawasan Daerah berubah nomenklatur menjadi Inspektorat Kabupaten.

Fungsi Inspektorat Kabupaten Siak diantaranya, penginventarisasian hasil pengawasan, melakukan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan. Kemudian melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan, mendokumentasikan

hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

Objek yang menjadi evaluasi Inspektorat Kabupaten Siak adalah organisasi perangkat daerah yakni dinas/badan termasuk pemerintah desa. Desa sebagai organisasi terkecil pada sebuah negara perlu mendapatkan perhatian, karena berperan sebagai ujung tombak pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan, menjalankan roda pembangunan. Dengan demikian aparatur desa perlu meningkatkan keterampilan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga memiliki kinerja yang baik, dapat dipertanggung jawabkan, tidak terjadi ketimpangan dalam berbagai sudut pandang.

Berdasarkan kondisi diatas jelas bahwa, peran Inspektorat Kabupaten Siak dalam evaluasi kinerja pemerintahan desa sangat diperlukan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak, Inspektorat Kabupaten Siak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam

menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang pengawasan, sebagai perangkat daerah yang diserahkan wewenang tugas dan tanggungjawab untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah di bidang pengawasan umum di daerah, pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.

Inspektorat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi: (a) perencanaan program pengawasan; (b) perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; (c) pemeriksaan, pengusukan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai salah satu instansi sektor publik yang berupaya responsif terhadap perubahan, Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Inspektur. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Tugas Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Dengan demikian Inspektorat adalah perangkat daerah yang memegang peranan kunci dalam perwujudan pemerintahan yang bersih dan baik.

Hanya saja yang menjadi permasalahan dari pengamatan yang dilakukan yakni: (a) masih terdapat kesulitan meminta laporan kepada pemerintahan desa berkaitan dengan dokumen laporan tindak lanjut dan data. (b) Masih terjadi perbedaan komunikasi dengan perangkat desa/ kampung. (c) Masih terjadi gangguan jaringan dalam memasukkan data ke sistem atau aplikasi yang sudah dibuat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan peran Inspektorat Kabupaten

Siak dalam evaluasi kinerja pemerintahan desa dan hambatanannya. Menurut Dunn dalam Akbar dan Mohi (2018:18), indikator dalam melakukan evaluasi adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Veni Angriani (Jurnal Jiana: 2021), tentang strategi pengembangan terhadap koperasi syariah di Kota Pekanbaru dengan indikator konsistensi, kesesuaian, keunggulan dan kelayakan. Hasilnya diketahui, faktor penghambat evaluasi adalah kebijakan yang belum sesuai, strategi yang kurang tepat dan sumber daya manusia yang kurang disiplin. Kinerja dalam sebuah organisasi diharapkan tentunya bisa berjalan dengan baik, oleh karena itu sumber daya manusia yang ada dalam organisasi harus menghindari kesalahan dan pembuangan waktu (Al Fajar dan Heru, 2013). Pelaksanaan aktivitas organisasi menurut Makmur (2009), akan terjamin pencapaiannya apabila diikat oleh suatu budaya yang harus dihormati dan dipanuti oleh semua anggota organisasi. Terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum itu terdapat aturan-aturan hukum tertulis dalam konstitusi atau peraturan-peraturan yang terhimpun dalam hukum tata negara (Ridwan HR, 2010).

## **METODE**

Penelitian dilakukan di Kantor Inspektorat Kabupaten Siak, Komplek Perkantoran Pemda Tanjung Agung, Sungai Mempura-Mempura. Informan ataupun narasumber dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara Kantor Inspektorat Kabupaten Siak. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dimana peneliti mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, konstekstual dan menyeluruh.

## HASIL

Kinerja Pemerintahan Kampung/ Desa Di Kabupaten Siak, pada dasarnya sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini seiring dengan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Siak yang kembali telah menerima/ meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Tahun 2021 dan keberhasilan menyerahkan laporan tahun 2022 di awal waktu (Maret 2023). Namun hasilnya belum keluar tapi diprediksi akan kembali hasi yang baik.

Menurut Sekretaris Inspektorat (Nining Rizkianti) saat penelitian dilakukan, peran Inspektorat Kabupaten Siak adalah melakukan pengawasan internal yang sifatnya pembinaan. Memperbaiki kekurangan yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pihaknya senantiasa datang ke kantor desa/ kampung setiap tahunnya untuk melakukan pembinaan.



Gambar 1. Kantor Inspektorat Kabupaten Siak. Komplek Perkantoran Pemda Tanjung Agung, Sungai Mempura, Mempura, Siak Regency, Riau 28773

Secara umum, keseluruhan desa/ kampung yang ada di Kabupaten Siak sudah tertib administrasi. Kabupaten Siak saat ini memiliki 122 desa/ kampung, 9 kelurahan dan 14 kecamatan. Bahkan Pemerintah Kabupaten Siak tengah memprogramkan seluruh kampung/ desa untuk menggunakan

aplikasi dalam menjalankan kinerja. Hasil pengecekan, sudah semua kampung/ desa yang menggunakan aplikasi meskipun masih terdapat kekurangan. Pemasukan data juga sudah menggunakan aplikasi termasuk keuangan dan pembangunan.

Banyak hal yang telah dilakukan dimulai dari yang kecil hingga besar, seperti penyiapan administrasi, surat tugas, jadwal, sudah direncanakan dengan baik oleh Inspektorat Kabupaten Siak. Jadwal tersebut baik yang bersifat bulanan maupun tahunan. Selanjutnya dilakukan evaluasi, mengingatkan, sesuai dengan matrik (perencanaan) yang telah dibuat. Dengan demikian Inspektorat Kabupaten Siak, siap kapan saja untuk melakukan kunjungan ke desa / kampung-kampung.

Untuk melihat evaluasi kinerja Pemerintahan Kampung oleh Inspektorat Kabupaten Siak, digunakan enam indikator. Indikator tersebut selanjutnya menjadi tolak ukur keberhasilan evaluasi yang dilakukan.

Efektivitas yang dimaksud adalah ketepatan dalam melaksanakan kinerja pemerintahan kampung/ desa. Dari segi penggunaan dana, dana desa yang diberikan kepada desa, yang diterima oleh pemerintahan desa dilakukan secara bertahap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud diantaranya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa.

Penyaluran dana dilakukan sebanyak tiga tahap penyalurannya yang dibagi dalam pos-pos pengeluaran. Terdiri dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang di atur dalam Peraturan desa Nomor 1 Tahun 2015.

Jadi diperkirakan efektivitas dana desa bidang pembangunan sebesar Rp.98 %. Kemudian efektivitas untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.85 % dalam kategori cukup efektif.

Efektifitas kinerja pemerintahan sangat diperlukan agar sumber daya manusia yang ada bisa mengelola anggaran. Ketika anggaran sudah terkelola dengan

baik maka akan terhindar dari keborosan/kemubaziran, tepat guna, tepat sasaran. Untuk tingkat desa/ kampung, efektifitas kinerja pemerintahan selain melihat anggaran juga melihat kepada program lainnya seperti pembangunan dan pemberdayaan serta layanan umum.

Tabel 1. Jumlah Kecamatan, Desa/ Kelurahan Di Kabupaten Siak

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Bunga Raya		10
2	Dayun		11
3	Kandis	3	8
4	Kerinci Kanan		12
5	Koto Gasib		11
6	Lubuk Dalam		7
7	Mempura	1	7
8	Minas	1	4
9	Pusako		7
10	Sabak Auh		8
11	Siak	2	6
12	Sungai Apit	1	14
13	Sungai Mandau		9
14	Tualang	1	8
	Jumlah	9	122

Sumber:

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Siak](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Siak)

Pembangunan desa baik fisik, rohani dan sosial sangat diperlukan karena saat ini terjadi pergeseran masalah kota ke desa seperti korupsi, prostitusi, narkoba. Diperlukan profesionalisme aparat kampung/ desa dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan. Dimulai dari internal aparat desa, selaku pelaksana pemerintahan selanjutnya kepada masyarakat. Begitu pula dalam program pemberdayaan, ketidakmampuan pemerintah berdayakan masyarakat berimbas kepada kurangnya kinerja pemerintahan yang sejauh ini baik. Menurut Sunaryanto dan kawan kawan (2012), agar terhindar dari korupsi, masyarakat harus memiliki pengetahuan tentang korupsi. Sekurang-kurangnya masyarakat mengerti apa itu korupsi dan perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan

sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam Bahasa yang sederhana, efisiensi adalah hemat. Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Siak terhadap kinerja pemerintahan kampung/ desa dari segi efisiensi sudah tergolong baik. Artinya, desa/ kampung umumnya sudah tergolong tingkat efesiensinya pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Siak sudah termasuk baik. Rata-rata sudah sesuai dengan program-program dan sasaran yang diinginkan oleh pemerintahan desa.

Tidak selamanya penghematan dikatakan dengan ketidakmampuan menggunakan anggaran. Kemampuan melihat fluktuasi harga barang (belanja fisik/ tidak langsung), ketepatan waktu menjadi hal terpenting dan perlu dipahami pemerintah ditingkat desa/ kampung sehingga terjadi tarif mahal/ penunggakan. Oleh karena itu agar terlaksana efisiensi kinerja, maka harus diawali dengan pengambilan keputusan yang tepat. Menurut Siagian (1997), kegiatan pengambilan keputusan akan menjadi efektif bila didekati dengan interdisipliner, proses yang sistematis, berdasarkan informasi, memperhitungkan faktor ketidakpastian dan diarahkan pada tindakan nyata.

Memanfaatkan sumber daya yang ada baik manusia maupun modal juga termasuk bagian dari efisiensi. Struktur organisasi yang gemuk dijadikan ramping, pemeliharaan asset/ inventaris yang baik juga sangat mendukung pemerintahan desa/ kampung dalam meningkatkan kinerja pemerintahan.



Gambar 2. Kunjungan ke Kampung Keranji Gugu Kecamatan Koto Gasib Kabupaten

Siak

Untuk pengadaan barang dan jasa agar bisa mencapai tahap efisiensi maka aparat pemerintahan kampung/ desa harus memiliki jaring yang luas terhadap produsen. Memiliki banyak alternatif tempat belanja sehingga bisa mendapatkan barang dengan kualitas sangat baik dengan biaya relatif tidak terlalu mahal.

Ditambah lagi dengan model belanja online saat ini, perlu dicoba, aparat desa/ kampung sudah saatnya untuk meleak dengan teknologi. Inspektorat Kabupaten Siak perlu memberikan pendampingan kepada pemerintahan desa/ kelurahan agar efisiensi yang dilakukan tetap mencapai target program kerja dan kegiatan yang direncanakan.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Siak mendapatkan penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perlu ditularkan dengan keberhasilan pemerintah desa/kampung dalam menjalankan kinerja. Pandangan negatif dari masyarakat terhadap perilaku aparat harus dihindari seperti pelisiran/ gaya hidup mewah, penggunaan kendaraan dinas dan fasilitas kantor lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai social perlu menjadi perhatian di tengah gencarnya pengawasan media sosial.

Melihat antusiasme masyarakat dalam menerima dan melaksanakan program serta besarnya manfaat yang secara langsung diterima oleh masyarakat, maka badan legislatif dan pemerintah menyampaikan agar pembangunan infrastruktur perdesaan yang dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat ini terus dilanjutkan. Dari sini tampak bahwa keberhasilan kinerja pemerintahan kampung/ desa didukung oleh pihak legislative desa dan daerah/ kabupaten.

Kemudian seiring dengan pelaksanaan PPIP tahun 2007, kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan penanggulangan kemiskinan penciptaan lapangan kerja terus digalakkan dan pemerintah telah meluncurkan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM)

mandiri pada tanggal 30 April 2007. Program pemberdayaan masyarakat yang ada diberbagai kementerian/ lembaga melalui konsolidasi, harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih baik.

Pada dasarnya menurut Syafie (2015), dalam pelayanan pemerintah, rasa puas masyarakat terpenuhi bila apa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Masyarakat menghendaki pembuatan kartu penduduk, izin mengemudi, izin mendirikan bangunan dan lain-lain dikerjakan dalam waktu singkat.

Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, pelaksanaan Program pembangunan infrastruktur perdesaan penanganannya tidak hanya difokuskan pada pembangunan atau peningkatan infrastruktur saja, tetapi juga dilakukan penguatan-penguatan dalam aspek pengembangan masyarakat, dan peningkatan peran pemerintah daerah. Pengembangan Masyarakat desa sasaran PPIP dilakukan melalui pelibatan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam pelaksanaan program mulai dari sosialisasi, musyawarah untuk penyusunan dokumen rencana program (PJM) dan rencana pelaksanaan kegiatan infrastruktur.

Kecukupan yang dimaksud dalam evaluasi kinerja pemerintahan kampung/ desa juga berkaitan dengan tersedia sarana dan prasarana pemerintahan. Dengan demikian tidak menjadi kendala dalam melaksanakan program kerja maupun kegiatan yang telah dirumuskan melalui musyawarah kampung/ desa.

Pemerataan Pembangunan ini umumnya sudah boleh dikatakan 98 % sudah merata pembangunannya. Tetapi kita perlu memperhatikan daerah-daerah perbatasan wilayah yang sangat perlu

dikembangkan dan digalakkan karna di daerah desa perbatasan mereka sangat minim dengan jumlah penduduknya sementara desa perbatasan mempunyai potensi-potensi alam yang bisa dikembangkan akan tetapi jumlah anggaran mereka agak kecil sementara mereka punya wilayah yang luas sehingga terjadi keterlambatan pembangunan yang belum maksimal.

Ada beberapa sudut pandang terhadap perataan; wilayah, jender, bidang, ekonomi dan lainnya. Dari segi wilayah, harus mencakup perkotaan, pesisir, pedalaman, perbatasan. Dengan demikian tidak ada masyarakat yang termarginalkan.

Dari jender, mesti mencakup laki-laki dan perempuan. Di era reformasi dengan semangat keterwakilan perempuan, emansipasi yang digagas RA Kartini, tidak mengalami surut meskipun tidak mencapai target. Namun sudah dijawab dengan berbagai kebijakan yang pro/ mendukung kepetingan perempuan seperti politik, program dan kegiatan.

Dari segi bidang, semangat reformasi menghendaki pemberdayaan perempuan diberbagai lini sektor. Kegiatan tidak lagi hanya program keterampilan keluarga tapi juga menjadikan perempuan sebagai agen-agen pelaksana pembangunan. Aparatur kampung/ desa sudah banyak diisi dan menempatkan perempuan sebagai ujung tombak pemerintahan.

Tidak sedikit pula perempuan yang menjadi pimpinan desa/ kampung, sekretaris, kepala urusan dan jabatan strategis lainnya di tingkat desa/ kampung. Bahkan sampai dengan bendahara atau bagian keuangan menempatkan perempuan sebagai orang yang terpercaya dan dipercaya.

Dari segi bidang, prioritas pemberdayaan perempuan dengan berbagai istilah program keterampilan keluarga, kelompok wirid ibu-ibu. Termasuk didalamnya dukungan anggaran untuk program yang memprioritaskan kepentingan perempuan telah diuyakan sehingga tidak hanya kebijakan saja.

Oleh sebab itu, Theresia dan kawan-kawan (2015), dalam kegiatan, perencanaan

dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan berbasis masyarakat menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan oleh para administrator dan fasilitator. Peran keduanya akan menunjang perataan kinerja pemerintahan kampung/ desa.

Pemerintahan Kampung/ Desa yang ada di Kabupaten Siak sangat merespon berbagai masukan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Siak melalui pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Siak. Terutama dalam hal tertib administrasi yang ditindak lanjuti dengan memberikan perbaikan atau lainnya.

Menurut Sekretaris Inspektorat Kabupaten Siak, Nining Riskianti, respon yang diberikan pemerintah desa/ kampung misalnya dalam bentuk penggunaan sistem digital, kepemimpinan (masa jabatan kepala desa dan pemekaran desa). Dari adanya respon tersebut berarti ada upaya untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada.

Hal lainnya diungkapkan salah seorang Auditor Kabupaten Siak yakni Yoseva. Dari laporan yang diberikan oleh pemerintah kampung/ desa, maka pihaknya memberikan masukan agar menjalankan kinerja berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku. *“Misalnya saran lainnya bisa berupa kekurangan dari segi administrasi supaya melengkapi administrasi tersebut. Ketika ada potensi kerugian negara, maka harus menyertokannya kembali ke kas negara atau kas desa,”* demikian dikatakan Yoseva.

Dari pernyataan auditor ini, maka pemerintah desa/ kampung yang ada di Kabupaten Siak mesti hati-hati dalam menggunakan anggaran. Dikhawatirkan jika terdapat kerugian maka harus mengembalikan anggaran yang sudah digunakan baik kecil apalagi besar. Jadi tidak hanya memperbaiki administrasi tapi juga tanggung jawab keuangan dan ini harus direspon oleh aparat desa/ kampung jika tidak ingin masuk ke ranah hukum dalam bentuk pidana atau perdata.

Pemerintah mengambil langkah

penataan organisasi penyelenggara pelayanan publik melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi di Indonesia mempunyai semangat meningkatkan kaulitas layanan untuk masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam salah satu area perubahan reformasi birokrasi yaitu pelayanan public, (Prabowo dan kawan-kawan, 2022).

Di Desa/ Kampung Keranji Guguh Kecamatan Koto Gasib, responsivitas yang dilakukan tidak hanya dari pimpinan kepada bawahan (Kabupaten ke Kampung/ Desa) tapi juga button up (Desa/ Kampung ke Kabupaten) yang juga senantiasa melibatkan masyarakat. Menurut Kepala Desa Keranji Guguh, Nurikhwani, berbagai respon yang diberikan pihaknya seperti bidang kesenian, kepemudaan, olahraga dan ibadah. Dalam bidang olahraga seperti pembangunan Gedung Olah Raga dan bidang keagamaan/ ibadah dalam bentuk masjid.

Ketepatan yang dimaksud disini adalah kesesuaian pemerintahan kampung/ desa dalam menjalankan kinerjanya. Dari segi hukum harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dari segi program dan kegiatan keseimbangan antara realisasi fisik dan anggaran. Dari segi tujuan, harus berkepentingan kepada orang banyak, tidak hanya kepentingan orang per orang atau kelompok tertentu.

Di Kampung/ Desa Keranji Guguh Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak khususnya, tidak ada terjadi yang namanya salah anggaran. Hadirnya Inspektorat Kabupaten Siak memberikan pembinaan menurut Nur Ikhwan selaku Kepala Desa/ Kampung memberikan dampak positif. Misalnya, Ketika ada yang salah atau kurang dalam perhitungan pajak atau belum terbayar, maka setelah kegiatan harus dibayar.

Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan intelektual untuk menghasilka kinerja pemerintahan kampung yang baik dan benar. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental; berpikir, menalar dan memecahkan suatu masalah, (Sunyoto dan

Buhanuddin, 2011).

Inspektorat dalam hal ini sebagai pihak yang melakukan verifikasi untuk melihat, apakah terjadi salah hitung atau tidak. Bahkan kepada hal-hal yang kecil Ketika belanja di kedai/ warung harus bisa dipertanggung jawabkan. Program yang ada di Dusun 1 Kampung Keranji Guguh misalnya dalam bentuk pembangunan danau wisata dan Dusun 2 dalam bentuk semenisasi. Laporrannya dilaksanakan secara tepat waktu, perencanaan yang tepat, penggunaan yang tepat, pemanfaatan yang tepat, dengan demikian tidak ada proyek yang mendapat sanksi atau teguran dari Inspektorat Kabupaten Siak.

Secara umum, masalah pelaporan yang menjadi permasalahan di keuangan desa dan administrasinya. Permasalahan yang terjadi dalam bentuk kelalaian dalam melakukan laporan keuangan maupun laporan administrasi desa. Setelah dipelajari dan dianalisa pemerintah kampung/ desa sudah membelanjakan keuangannya tetapi belum melengkapi semua laporan dan bukti-bukti belanja. Ketika Tim Inspektorat mau turun untuk pemeriksaan keuangan desa baru sibuk melengkapi semua laporan sehingga ketika inspektorat turun laporan meraka belum siap dan selesai. Maka pada waktu yang ditetapkan belum juga ada maka pihak inspektorat memberikan masukan agar segera dilengkapi.

## PEMBAHASAN

Secara umum kinerja Pemerintahan Kampung/ Desa/ kelurahan di Kabupaten Siak berdasarkan hasil evaluasi sudah berjalan dengan baik. Namun tetap perlu peningkatan kuantitas dan kualitas dala hal penguasaan teknologi. Hal ini dikarenakan administrasi yang dilaksanakan untuk saat ini sudah memasuki berbasis teknologi. Dengan demikian maka perlu pelatihan bagi aparatur desa/ kelurahan/ kampung bagi yang belum memiliki keahlian atau dalam rangka peningkatan keahlian dan hal ini perlu dilakukan secara berkelanjutan karena dalam prakteknya tidak bisa langsung menguasai. Bagi yang sudah berhasil maka

yang bersangkutan bisa langsung mandiri namun yang belum masih perlu pendampingan.

Pendampingan yang dilakukan tentu perlu menghadirkan orang yang ahli sehingga tidak menyusahkan pihak inspektorat Ketika meminta kejelasan terhadap hal-hal teknis yang perlu penjelasan. Pendampingan ini bisa dari unsur Pemerintahan Kabupaten Siak atau menggunakan pihak eksternal.

Kemudian dari pihak Pemerintah Kabupaten Siak perlu memfasilitasi pemerintah kampung/ desa/ kelurahan terkhusus yang biasa membuat laporan untuk memegang komputer atau labtop sendiri yang tidak digunakan untuk kepentingan lain. Sebab jika digunakan untuk kepentingan lain dikhawatirkan akan terkena virus atau mengganggu kinerja yang telah diamankan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diamankan untuk membuat evaluasi kinerja (laporan) harus yang memahami dan menyadari akan arti penting tertib administrasi. Mencintai dan memiliki kebijaksanaan dalam menterjemahkan berbagai indikator yang dibuat. Orang tersebut harus arif, mengabdikan sepenuhnya kepada negara, bukan pemimpin semata yang hanya berorientasi pada kekuasaan semata. Dimana menurut Socrates, bahwa keagungan manusia tidak terletak pada kekuasaan dan pengaruhnya dalam kekuasaan tersebut. Tetapi justru terletak pada penggunaan akal budi dalam menata kehidupan aparatur negara/ pemerintahan yang berujung pada simetri kemanusiaan. Selanjutnya sebagai negeri Melayu yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan istiadat serta agama, maka evaluasi kinerja yang dibangun tetap bersendikan kepada adab/ aturan budaya dan aturan agama. Dengan demikian kinerja yang baik tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan di dunia tapi juga diakhirat sehingga memiliki kenyamanan hidup sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah yang ingin dicapai.

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut, evaluasi kinerja pemerintahan kampung/ desa di Kabupaten Siak sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan oleh Inspektorat Kabupaten Siak.

Hambatan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintahan kampung/ desa di Kabupaten Siak adalah: (a) Penggunaan aplikasi kinerja yang belum dilakukan secara mandiri oleh pemerintah desa/ kampung dan (b) Perataan pembangunan belum di semua desa/ kampung dari segi sarana dan prasarana desa

## DAFTAR RUJUKAN

- Akbar dan Mohi, 2018, Studi Evaluasi Kebijakan, Ideas Publishing, Gorontalo.
- Al Fajar, Siti dan Tri Heru, 2013, Manajemen Sumber Daya Manusia, UPPSTIM YKPN, Yogyakarta.
- Prabowo, Hadi dan kawan-kawan, Inovasi Pelayanan Publik, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ridwan, 2010, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siagian, 1997, Teori Dan Praktek Pengambilan Keputusan, PT Toko Gunung Gunung Agung, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2015, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sunaryanto, Agus, dan kawan kawan, 2012, Modul Monitoring Penegakan Hukum, Indonesia Corruption Watch, Kalibata.
- Sunyoto, Danang dan Burhanuddin, 2011, Perilaku Organisasi, Caps, Yogyakarta.
- Theresia, Aprilia, dan kawan-kawan, 2015, Pembangunan Berbasis Masyarakat, Alfa Beta, Bandung.
- Veni Angriani, 2021, Evaluasi Strategi Pengembangan Terhadap Koperasi Syariah Di Kota Pekanbaru, Jurnal Jiana, Pekanbaru.